



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
UNIT KERJA : DINAS PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ANITHA FITRHIANIE
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3. NHK : 505759

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	165.000.000
1. Tanah Seluas 237 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HIBAH TANPA AKTA Rp. 165.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	518.000.000
1. MOTOR, HONDA V1J02Q32L0 Tahun 2019, HADIAH Rp. 13.000.000		
2. MOTOR, HONDA SPD-YTR/SOLO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 22.000.000		
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 23.000.000		
4. MOBIL, HONDA MOBIL PENUMPANG MINI BUS Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 460.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	60.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	5.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	748.000.000
III. HUTANG	Rp.	791.238.018
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	-43.238.018

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
UNIT KERJA : DINAS PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JERPITA
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
3. NHK : 869488

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.509.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/150 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 909.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 10000 m2/10000 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	388.000.000
1. MOTOR, HONDA SCOPY SCOPY Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000		
2. MOBIL, DAIHATSU ROKKY Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000		
3. MOBIL, DAIHATSU TERIOS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	45.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	200.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.942.200.000
III. HUTANG	Rp.	498.598.441
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.443.601.559

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
UNIT KERJA : DINAS PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

- Nama** : MUKHLIS
- Jabatan** : KEPALA BIDANG
- NHK** : 793456

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **435.000.000**

- Tanah dan Bangunan Seluas 475 m2/96 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
- Tanah Seluas 430 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **73.240.000**

- MOBIL, AVANSA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
- MOTOR, HONDA SCOOTER SOLO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 3.240.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **5.550.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **319.385.728**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **833.175.728**

III. HUTANG **Rp.** **----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **833.175.728**

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
UNIT KERJA : DINAS PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ROSITA KUNA
2. Jabatan : KEPALA UPTD
3. NHK : 509270

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.125.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/117 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 635.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1.5 m2/243 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 375 m2/375 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 134.000.000

1. MOBIL, AVANSA MOPEN/MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAD HONDA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 3.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 30.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. 400.000

Sub Total Rp. 1.292.400.000

III. HUTANG Rp. 497.252.964

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 795.147.036



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
UNIT KERJA : DINAS PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

- Nama** : VERAWATY
- Jabatan** : KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
- NHK** : 786691

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	550.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 280 m2/238 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	280.000.000
1. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	4.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	30.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	864.000.000

III. HUTANG **Rp.** **----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **864.000.000**

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
UNIT KERJA : DINAS PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : WILHELMINA MK.
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 450895

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	590.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 209 m2/45 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 555.000.000		
2. Tanah Seluas 450 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	----
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	20.100.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	610.100.000

III. HUTANG **Rp.** **125.487.387**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **484.612.613**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
UNIT KERJA : DINAS PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YULIANSYAH
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 500211

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.140.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 228 m2/144 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 632.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 375 m2/120 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 427.000.000		
3. Tanah Seluas 660 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 81.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	206.500.000
1. MOTOR, HONDA C1CON16M2AT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000		
2. MOBIL, WULING ALMAZ Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	25.854.523
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.372.354.523
III. HUTANG	Rp.	79.521.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.292.833.523

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
UNIT KERJA : DINAS PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YUNI FACHRIZAL NOOR
2. Jabatan : KEPALA UPTD
3. NHK : 779220

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	735.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 196 m2/150 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 390.000.000		
2. Tanah Seluas 440 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000		
3. Tanah Seluas 480 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	180.000.000
1. MOBIL, HONDA MOBILIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000		
2. MOTOR, HONDA SCOOPY SEPEDA MOTOR MATIC Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	16.340.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	1.500.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	900.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	933.740.000
III. HUTANG	Rp.	365.500.971
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	568.239.029

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.